

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Edi Subiyanto, 2019, *Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*. Depok, Rajawali Pers
- Brian Z. Tamanaha., 2004. *On the rule of law, history, politics, theory*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Jakarta, Sinar Grafika
- Enrico Simanjuntak, 2024, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Ismail Nurdin, 2017, *Etika pemerintahan: Norma, konsep, dan praktek bagi penyelenggara pemerintahan*, Lampung, Lintang Rasi Aksara Books,
- Farid Wajdi, 2018, *Independensi dan Akuntabilitas Peradilan*, dalam *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta Pusat, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Festy Rahma Hidayati, 2018, *Fokus Arah Manajemen Hakim*, dalam *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta Pusat, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Hans Kelsen, 2015, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Nusa Media, terjemahan dari buku Hans Kelsen, 1978, *Pure Theory of Law*, Berkely, University of California Press
- Hendry Julian Noor dan Alif Duta Hardenta, 2024, dalam *Hukum Administrasi Negara: Konsep, Fundamental, Perkembangan Kontemporer, dan Kasus*, Depok, Rajawali Pers
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*, Jakarta, Pustaka Harapan
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Hitam Putih Pengadilan Khusus*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pendahuluan dalam Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Jakarta Pusat, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie, 2022, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Kasman Bakry, et. al. 2025, *Sistem Peradilan Indonesia*, Kota Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia
- Lon L. Fuller, 1969, *The Morality of Law: Revised Edition*, Yale University Press
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta
- Riawan W. Tjandra, 2023, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Filosofi, Teori, dan Praktek*, Sleman, PT Kanisius
- Ridwan, H.R., 2020, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok, Rajawali Pers

Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolok Ukur Dadan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Bandung, Alumni
Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Nusa Media
Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
Manotar Tampubolon, 2023, *Etika dan Tanggungjawab Profesi*, Padang, PT Global Eksekutif Teknologi,

Jurnal/Makalah

Emanuel Raja Damaitu dan Christian Adam Kautsar. "Penguatan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia melalui Peradilan Etik." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 2 (2023),
Ni Komang Tri Anna Pramesti, *et. al.*, "Analisis Kedudukan Tindakan Faktual sebagai Perluasan Objek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Media Akademik* 4, no. 6 (2026),
Yogo Pamungkas, "Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020),
Hasrianto. "Pertanggungjawaban Nakhoda pada Peristiwa Kecelakaan Kapal menurut Undang-Undang Pelayaran." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 1 (2021),
Muhammad Ridwan, *et. al.*, "Kode etik dan penegakan hukum dalam konteks positivisme hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 4 (2024),
S. F. Marbun, 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 37, dikutip oleh Muhammad Kamil Akbar. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (2021),
Advento Jerenimo dan Siti Mutmainah. "Implikasi Yuridis Mengenai Kebijakan Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Pengujian Tindakan Faktual", *Semarang Law Review* 6, no. 1, (2025)
Afrinald Rizhan, "Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen." *Kodifikasi* 2, no. 1 (2020)
Assauri Sufyan *et. al.*, "Teori Keadilan Dan Moralitas." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 02 (2025)
Atmaja Wijaya dan Didan Neofal Arsyandi. "Anomali Kewenangan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Teori Separation of Power Montesquieu: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 3, no. 2 (2023)
Idul Rishan, "Justifikasi pelembagaan peradilan etik." *Dialogia Iuridica* 9, no. 1 (2017),
Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010)
Agussyah Ramadani Damanik "Pengujian Putusan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Ranah Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Normatif Universitas Al-Azhar Medan* 4, no. 2 (2025),

- Musri, *et. al.*, "Integrasi Etika Administrasi dan Hukum dalam Mewujudkan Good Governance." *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 6, no. 2 (2026),
- Bonita Cinintya Putri, "Perdebatan Etika Vs Hukum Sebagai Norma yang Memiliki Sanksi Mengikat Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Keuangan." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1, no. 5, (2021)
- Nehru Asyikin, "Freies Ermessen sebagai Tindakan atau Keputusan Pemerintah Ditinjau dari Pengujiannya." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2020)
- Cindy Amalia, "Tumpang Tindih Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Tantangan dalam Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2025)
- Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah. "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023)
- Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, "Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Pengadilan Tatausaha Negara", *Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007)
- Yusup Kurnia, "Keadilan dalam penegakan pelanggaran etika penyelenggara pemilu." *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 2 (2020),
- Didan Neofal Arysandi dan Rizqi, M., "Problematika Aturan Pemungutan Suara Ulang dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (2024)
- Miswardi, *et. al.*, "Etika, Moralitas dan Penegak Hukum." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 15, no. 2 (2021),
- Dola Riza, "Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018)
- Firda Arifatuzzahrah dan Irham Bashori Hasba. "Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024)
- Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, 12, No. 2, (2016)
- Firmansyah, *et. al.*, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2021)
- Pamungkas Satya Putra, "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2016),
- Fradhana Putra Disantara, *et.al.*, "Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics." *LITIGASI* 24, no. 1 (2023)
- Munib, *et. al.*, "Kewenangan Bawaslu dalam Menyelesaikan Pelanggaran Etik: Batas Antara Fungsi Pengawasan dan Peradilan Etik" *Laporan Akhir Penelitian*

- Internal Dosen: Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bojonegoro*, (2026),
- Herman dan Hendry Julian Noor. "Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (*Beschikking*).*" Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 1 (2017)
- I. Gusti Ayu Adisya Putri Maheswari dan AA Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Peran Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Hakim Melalui Sistem Check And Balances Kekuasaan Kehakiman Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025)
- Ida Bagus Putu Sudiarta, *et. al.*, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politic." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024)
- Idul Rishan, "Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Peradilan terhadap Pengelolaan Jabatan Hakim setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (2019)
- Janitra Syena Narindra dan Budi Ispriyarso. "Analisis Penghapusan Syarat Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penggunaan Diskresi Pada Omnibus Law Cipta Kerja." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022)
- Karensia Payoh dan Arman Tjoneng. "Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Di PTUN Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024)
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020)
- Richo Andi Wibowo, "*Civil Servant Disobedience: an Alternative Legal Strategy to Prevent Bureaucratic Pathology.*" *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 5, no. 1 (2025),
- La Senu, *et. al.*, "Analisis Sifat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 3 (2023)
- Muammar dan Iqbal Taufik. "Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024)
- Muh. Risnain, "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 1 (2014)
- Muhammad Kamil Akbar. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (2021)

- Mukhtar dan Tanto Lailam. "Problem Etika Pejabat Negara dan Gagasan Peradilan Etik yang Independen dan Imparsial." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021)
- Nur Asyiah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016)
- Philipus M. Hadjon, "Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015)
- Putrijanti Aju, *et. al.*, "Peran PTUN dan AUPB menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)." *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018)
- Safa'at, Rheina Aini, dan Graciella Azzura Putri Ananda. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024)
- Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024)
- Sri Wahyuni dan Arif Wibowo. "Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN)." *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 1 (2023), and Arif Wibowo. "Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN)." *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 1 (2023)
- Suhaimi, "Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif." *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018)
- Sutan Sorik, *et. al.*, "Eksistensi MKMK (Studi Keputusan MKMK Nomor 01/MKMK/X/2013)." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018)
- Syafruddi Muhtama dan Muhammad Ashri. "Dikotomi moral dan hukum sebagai problem epistemologis dalam konstitusi modern." *Jurnal Filsafat* 30, no. 1 (2020)

Tesis dan Disertasi

- Raisa Fahniadi Setiawan, 2022, *Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menguji Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu*, Tesis, Program Studi Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ni Nengah Adiyaryani, 2017, *Asas Independensi dan Imparsialitas Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Website

- Publikasi, Badan Kepegawaian Negara, Jenis Pelanggaran dan Sanksi Netralitas ASN Selama Pemilu 2024, 2 Februari 2024, <https://www.bkn.go.id/jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024-2>, diakses pada hari Kamis, 3 September 2026, pukul 22.00

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://www.kbbi.web.id/etika>, Diakses pada hari Jumat, 28 November 2025, Pukul 00.12

Oce Madril, “KY dan Akuntabilitas Hakim”, 30 Juni 2011, <https://nasional.kompas.com/read/2011/06/30/02385890/KY.dan.Akuntabilitas.Hakim?page=all>, diakses pada 21 April 2026, pukul 01.26

Saldi Isra, Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial, 9 Mei 2010, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422>, diakses pada hari Jumat 20 Februari 2026, pukul 22.20

Sulistiyowati Irianto, “Etika, Hukum dan Tanggung Jawab Akademis”, 24 September 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=ASoPD6nTyKA> diakses pada 8 April 2026, Pukul 01.54

Multimedia Polres Kulonprogo, Polri Tegakkan Kode Etik Kasus DWP 2024: Sidang KKEP Hasilkan Putusan Penting, 14 Januari 2025 <https://jogja.polri.go.id/kulonprogo/tribrata-news/online/detail/polri-tegakkan-kode-etik-kasus-dwp-2024--sidang-kkep-hasilkan-putusan-penting>, diakses pada Sabtu, 5 September 2026, pukul 16.00

Peraturan Perundang-undangan

R.I., Undang-Undang Dasar 1945

R.I., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

R.I., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

R.I., Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

R.I., Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

R.I., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

R.I., Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

R.I., Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

R.I., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

R.I., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jis*. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

R.I., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

R.I., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU XI/2013 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tahun 2023 tentang Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028

Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi

Lainnya

Yagie Sagita Putra dan Joko Setiyono Pujiyono. "*Dialectic between law and morals in examining corruption cases and law enforcement in Indonesia.*" In *IWLEG 2022: Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG 2022, 27 July 2022, Semarang, Indonesia.*